



Efektivitas Implementasi Aplikasi Sakti Dalam mendukung Digitalisasi Penyusunan Laporan Keuangan

Fatharani*, Fachruzaman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bengkulu, Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu, Indonesia
Email: ¹c1c022052.fatharani@mhs.unib.ac.id, ²fachruzzaman.ca@unib.ac.id

Email Penulis Korespondensi: c1c022052.fatharani@mhs.unib.ac.id

Submitted: 17/03/2026; Accepted: 04/05/2026; Published: 07/05/2026

Abstrak—Transformasi digital dalam tata kelola keuangan negara merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi aplikasi SAKTI dalam mendukung digitalisasi penyusunan laporan keuangan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sebelas informan, termasuk operator, validator, dan approval serta diperkuat dengan dokumentasi dan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKTI efektif dalam meningkatkan efisiensi proses pelaporan dan akurasi pencatatan melalui validasi otomatis yang meminimalkan kesalahan input. Secara sistemik, aplikasi ini mengintegrasikan seluruh tahapan keuangan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam satu sistem terpadu yang memiliki audit trail yang kuat. Pegawai memaknai digitalisasi ini sebagai perubahan tanggung jawab personal dan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur. Meskipun terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan pemeliharaan sistem terpusat, hal tersebut bersifat temporer dan tidak mengganggu keberlangsungan proses pelaporan secara signifikan. Secara keseluruhan, SAKTI berhasil memperkuat prinsip good governance pada instansi teknis pemerintah.

Kata Kunci: SAKTI; Transformasi Digital; Akuntabilitas Publik; Laporan Keuangan Pemerintah; Transparansi Keuangan

Abstract—Digital transformation in public financial governance is an essential part of bureaucratic reform aimed at enhancing transparency and accountability. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the SAKTI application in supporting the digitalization of financial statement preparation at the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of Bengkulu Province. The research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews with eleven informants, including operators, validators, and approvers, and were strengthened by documentation and triangulation techniques to ensure data validity. The results indicate that the implementation of SAKTI is effective in improving the efficiency of reporting processes and the accuracy of financial records through automatic validation that minimizes input errors. Systemically, the application integrates all stages of financial management, from planning to accountability, within a single system equipped with a strong audit trail. Employees perceive this digitalization as a shift toward greater personal responsibility and increased compliance with procedures. Although technical issues such as network disruptions and centralized system maintenance were encountered, these were temporary and did not significantly hinder the reporting process. Overall, SAKTI has successfully strengthened the principles of good governance in technical government institutions.

Keywords: SAKTI; Digital Transformation; Public Accountability; Government Financial Statements; Financial Transparency

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola keuangan negara merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Efremova, 2024; Zhuk et al., 2022). Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan anggaran, pada tahun 2022 pemerintah Indonesia meluncurkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai bentuk Integrated Financial Management Information System (IFMIS) di tingkat satuan kerja (Indonesia, 2022; Simamora & Wahyudi, 2022). SAKTI diwajibkan bagi seluruh entitas pelaporan dan akuntansi kementerian atau lembaga, serta dirancang menggantikan aplikasi sebelumnya dengan mengintegrasikan fungsi anggaran dan perbendaharaan dalam satu sistem terpadu (Wiratmoko et al., 2024).

Sejak implementasi penuh pada tahun 2022, SAKTI tidak hanya ditujukan untuk menggantikan aplikasi lama seperti SAIBA, SAS, SIMAK-BMN, dan RKA-KL, tetapi juga diorientasikan untuk memastikan terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah (Gultom & Harahap, 2024). Penerapannya menjadi salah satu tonggak penting digitalisasi keuangan negara yang relevan untuk dikaji efektivitasnya di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu.

Kajian akademik menunjukkan bahwa SAKTI memiliki peran penting dalam mendorong proses digitalisasi keuangan pemerintah, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi faktor lain. Aplikasi ini dianggap mampu mempercepat proses pelaporan bendahara di KPPN, walaupun keterbatasan infrastruktur dan adaptasi pengguna tetap menjadi kendala (Dwihaika & Rukmini, 2024). Keberhasilan implementasi SAKTI tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman sumber daya manusia serta dukungan organisasi dan fasilitas pendukung (Rahman et al., 2023).

Penelitian lain juga menyoroti kelebihan dan kelemahan penerapan sistem ini di berbagai instansi. SAKTI dinilai berperan efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan di Kementerian Agama Kota Binjai, meskipun literasi digital pegawai masih terbatas dan gangguan jaringan sering terjadi (Nasution et al., 2024). Keterbatasan sistem dalam mengakomodasi transaksi multi-mata uang justru meningkatkan jumlah jurnal manual yang berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan (Indonesia, 2023; Putri & Harahap, 2024). Dari perspektif internasional, digitalisasi akuntansi di



Nigeria meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun masih menghadapi hambatan teknis dan kelembagaan (Kadir et al., 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SAKTI dipengaruhi oleh faktor teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta kesiapan dan dukungan organisasi (Khairudin, 2024; Zaenudin et al., 2024). Selain itu, studi-studi terdahulu juga menyoroti berbagai kendala teknis dan integrasi sistem dalam penerapan SAKTI pada instansi pusat, seperti masih perlunya aplikasi pendukung, potensi kesalahan pencatatan, serta keterbatasan fitur dalam mendukung proses pelaporan keuangan secara optimal (Azkar et al., 2023; Perdana et al., 2023; Said & Yendrawati, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada kementerian pusat atau instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta pada sektor pendidikan dan keagamaan. Sementara itu, implementasi SAKTI pada instansi teknis non-keuangan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi karakteristik yang berbeda, terutama terkait kompleksitas layanan publik dan pengelolaan anggaran yang bersifat operasional. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam menilai sejauh mana sistem SAKTI benar-benar efektif ketika diterapkan pada konteks instansi teknis yang memiliki dinamika kerja yang lebih kompleks. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana pengalaman dan pemaknaan pegawai dalam mengoperasikan sistem tersebut memengaruhi efektivitas digitalisasi penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas implementasi SAKTI dalam konteks instansi teknis guna menjawab kesenjangan antara desain sistem dan praktik implementasinya di lapangan.

Penelitian ini diarahkan untuk menggali pemaknaan pegawai terhadap efektivitas penerapan SAKTI dalam digitalisasi penyusunan laporan keuangan di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Integrasi sistem digital akuntansi dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Pratama et al., 2025). Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem keuangan berbasis teknologi (Fathiya & Viani, 2025). Dukungan organisasi juga sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi di sektor publik (Nasrulloh & Nabire, 2025). Berdasarkan penelitian tersebut, fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana kompetensi pegawai, dukungan infrastruktur, dan komitmen organisasi membentuk pengalaman mereka dalam memaknai keberhasilan implementasi SAKTI.

Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship*, yang menekankan bahwa pegawai sebagai *steward* akan bertindak untuk kepentingan organisasi dengan mengutamakan kepercayaan, komitmen, dan akuntabilitas dalam mengelola sistem keuangan negara (Rouault & Albertini, 2021). Kerangka ini diperkuat oleh teori *tata kelola (good governance)* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan partisipasi dalam proses pengelolaan publik, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari mutu layanan, tetapi juga dari kualitas proses pemerintahan dan keterlibatan pemangku kepentingan (Rahmawati & Tjenreng, 2025). Selanjutnya, efektivitas tata kelola dan sistem informasi publik dapat dievaluasi melalui indikator efektivitas multidimensional yang meliputi tiga dimensi utama, yaitu aspek finansial, yang mencakup efisiensi pengelolaan sumber daya dan ketepatan pelaporan keuangan; aspek sistemik, yang menilai keterpaduan, keandalan, dan keberlanjutan sistem dalam mendukung proses kerja; serta aspek sosial, yang menekankan pada penerimaan, adaptasi, dan keterlibatan pengguna terhadap sistem (Ogedengbe et al., 2024).

Penelitian ini secara eksplisit memberikan dua kontribusi utama. Pertama, secara empiris, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji efektivitas implementasi SAKTI pada instansi teknis non-keuangan, yaitu BPN, yang memiliki karakteristik operasional dan kompleksitas layanan publik yang berbeda dibandingkan instansi administratif yang selama ini lebih banyak diteliti. Kedua, secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi sistem informasi keuangan publik (IFMIS) dengan mengintegrasikan perspektif *stewardship* dan *good governance* dalam menjelaskan bagaimana interaksi antara teknologi, sumber daya manusia, dan dukungan organisasi membentuk efektivitas sistem.

Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dengan menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pemaknaan pengguna terhadap sistem, yang belum banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai efektivitas penerapan SAKTI, tetapi juga memberikan implikasi praktis dalam mendukung optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, serta pemaknaan pegawai terhadap efektivitas penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam proses digitalisasi penyusunan laporan keuangan. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan persepsi pegawai terhadap efektivitas penerapan SAKTI dalam proses penyusunan laporan keuangan di lingkungan kerja mereka.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial, proses adaptasi, serta interpretasi subjektif informan terhadap sistem yang diimplementasikan dalam lingkungan birokrasi teknis (Creswell & Creswell,



2023). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penerapan SAKTI tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir berupa laporan keuangan yang tersusun secara tepat waktu, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan interaksi antara sistem, kompetensi pengguna, serta dukungan organisasi. Oleh karena itu, desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sistem tersebut dijalankan, dipahami, dan dievaluasi oleh para pegawai di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu.

2.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi sebagai instansi teknis yang memiliki kompleksitas operasional dalam pelayanan publik pertanahan. Berbeda dengan kementerian pusat yang bersifat administratif, BPN memiliki karakteristik layanan teknis yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga implementasi sistem keuangan digital dalam konteks ini menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam.

Subjek penelitian terdiri atas sebelas pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi SAKTI pada aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Informan mencakup operator SAKTI, pejabat approval, dan validator laporan keuangan. Variasi peran ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai proses input data, validasi, koreksi, hingga pengesahan laporan keuangan. Perbedaan posisi struktural dan tanggung jawab memungkinkan diperolehnya sudut pandang yang beragam terkait efektivitas sistem.

Tabel 1. Daftar Narasumber

Kode	Posisi
I1	Approval
I2	Validator/PPK
I3	Administrator
I4	Operator
I5	Operator
I6	Operator
I7	Operator
I8	Operator
I9	Operator
I10	Operator
I11	Operator

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan partisipan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi keterlibatan langsung dalam operasional SAKTI, pengalaman menggunakan sistem dalam periode implementasi penuh, serta tanggung jawab terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Jumlah informan ditetapkan berdasarkan prinsip kecukupan informasi, yakni ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang konsisten dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan kerangka konseptual yang mencakup tiga dimensi efektivitas, yaitu aspek finansial, sistemik, dan sosial.

Pertanyaan wawancara mencakup pengalaman penggunaan SAKTI dalam proses kerja, persepsi terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan, tingkat integrasi dan keandalan sistem, hambatan teknis yang dihadapi, serta tingkat penerimaan dan adaptasi pegawai terhadap digitalisasi sistem keuangan. Pendekatan semi-terstruktur memungkinkan peneliti menjaga arah diskusi tetap sesuai dengan fokus penelitian, sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih mendalam.

Wawancara dilakukan secara langsung di lingkungan kantor dengan durasi yang disesuaikan dengan ketersediaan informan. Seluruh wawancara didokumentasikan dan ditranskripsikan secara lengkap untuk menjaga keutuhan informasi.

Selain wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem, dokumen administrasi terkait implementasi SAKTI, serta arsip internal yang relevan. Penggunaan berbagai sumber data bertujuan untuk memperkaya konteks analisis serta mendukung validitas temuan.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik sebagaimana dikemukakan oleh (Byrne, 2022). Proses analisis diawali dengan mentranskripsi hasil wawancara secara menyeluruh. Transkrip kemudian dibaca berulang kali untuk memahami keseluruhan makna dan konteks pengalaman informan.

Selanjutnya, proses analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan pengkodean awal (initial coding) dengan mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan untuk membentuk kategori awal. Ketiga, kategori



tersebut dikembangkan menjadi tema-tema utama yang mencerminkan pola pengalaman informan dalam penggunaan SAKTI. Tema yang telah terbentuk kemudian ditinjau kembali (reviewing themes) untuk memastikan konsistensi dan kesesuaiannya dengan data. Setelah itu, tema diklasifikasikan secara sistematis ke dalam tiga dimensi efektivitas, yaitu aspek finansial, sistemik, dan sosial. Tahap akhir analisis dilakukan melalui proses interpretasi dengan mengaitkan tema-tema yang diperoleh dengan konteks organisasi serta kerangka teoritis yang digunakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan dapat direplikasi. Interpretasi akhir dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan konteks organisasi sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas implementasi sistem dalam penyusunan laporan keuangan.

2.5 Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan peran yang berbeda, seperti operator, pejabat approval, dan validator, guna memastikan konsistensi pandangan mereka terhadap efektivitas implementasi SAKTI. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan dan dokumen administratif. Langkah ini bertujuan memperkuat kredibilitas temuan dan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan (Sugiyono, 2022). Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi ulang terhadap ringkasan hasil interpretasi kepada beberapa informan untuk meminimalkan bias subjektif dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya merepresentasikan perubahan instrumen administratif, tetapi juga mencerminkan pergeseran mendasar dalam cara organisasi publik membangun akuntabilitas dan mengendalikan proses kerja keuangan. Dalam konteks tersebut, penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menjadi ruang penting untuk memahami bagaimana sistem keuangan digital dijalankan, dimaknai, dan diintegrasikan ke dalam praktik kerja birokrasi. Pada Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, penerapan SAKTI memperlihatkan dinamika interaksi antara sistem teknologi, kompetensi pengguna, serta mekanisme organisasi yang membentuk proses penyusunan laporan keuangan.

Efektivitas penerapan SAKTI dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai capaian teknis sistem, melainkan sebagai proses yang mencerminkan bagaimana pegawai beradaptasi dengan perubahan pola kerja, memaknai digitalisasi keuangan, serta merespons tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam praktiknya, penerapan sistem ini juga dihadapkan pada berbagai kendala implementatif yang memengaruhi pengalaman pengguna dan keberlanjutan proses kerja keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem keuangan digital tidak berdiri sendiri sebagai instrumen teknologi, tetapi terbentuk melalui interaksi antara sistem, pengguna, dan konteks organisasi tempat sistem tersebut dioperasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas SAKTI perlu dipahami melalui pengalaman empiris pegawai, dengan menempatkan temuan wawancara yang telah direduksi dan ditabulasikan dalam kerangka analisis deskriptif-analitis guna menjelaskan implikasi penerapan sistem terhadap tata kelola keuangan di instansi teknis pemerintah.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2, temuan penelitian ini mengelompokkan efektivitas penerapan SAKTI ke dalam dimensi finansial dan sistemik sebagai dasar analisis.lanjut

3.1 Efektivitas Penerapan SAKTI

Tabel 2. Dimensi Efektivitas Penerapan SAKTI

Dimensi Efektivitas	Aspek yang Diamati	Pola Temuan
Finansial	Efisiensi proses pelaporan	Proses penyusunan laporan keuangan berlangsung lebih cepat dan terstandar dibandingkan sebelum integrasi sistem
Finansial	Akurasi pencatatan	Validasi otomatis sistem membatasi kesalahan input dan koreksi berulang
Sistemik	Integrasi proses kerja	Tahapan penganggaran, pencatatan, dan pelaporan terhubung dalam satu sistem
Sistemik	Ketertelusuran data	Transaksi keuangan dapat ditelusuri secara berkelanjutan dari awal hingga pelaporan

Penerapan SAKTI di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu tercermin pada dimensi finansial dan sistemik yang saling berkaitan. Dari aspek finansial, penggunaan sistem terintegrasi mendorong efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan melalui percepatan proses persetujuan serta pengurangan pekerjaan manual yang sebelumnya dilakukan secara berulang. Validasi otomatis dalam sistem membatasi kemungkinan kesalahan input data dan meminimalkan inkonsistensi pencatatan, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Efisiensi tersebut



tidak hanya berkaitan dengan percepatan waktu kerja, tetapi juga mencerminkan peningkatan ketepatan, konsistensi, dan kualitas data sebagai dasar pertanggungjawaban anggaran. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

“Data yang diinput langsung bisa ditarik dan muncul otomatis di sistem. Kalau dulu bisa butuh beberapa hari, sekarang hanya sehari selesai.” (I4)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antar modul dalam sistem SAKTI tidak hanya mempermudah proses pencatatan transaksi, tetapi juga meningkatkan keterlacakan data keuangan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Hal ini juga ditegaskan oleh informan yang menjelaskan bahwa:

“SAKTI mengintegrasikan semua proses keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam satu sistem terpadu.” (I4)

Pada dimensi sistemik, implementasi SAKTI memperkuat keterpaduan proses kerja keuangan melalui integrasi antar modul yang memungkinkan alur administrasi berjalan secara berkesinambungan. Pencatatan transaksi yang sistematis serta keterhubungan antar modul memungkinkan data keuangan ditelusuri sejak tahap perencanaan hingga pelaporan secara terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang menjaga keteraturan dan kesinambungan alur kerja. Dalam konteks instansi teknis seperti BPN yang memiliki kompleksitas anggaran dan layanan publik yang tinggi, keterpaduan sistem menjadi faktor penting dalam memastikan stabilitas administrasi serta efektivitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan interpretasi terhadap data lapangan, efektivitas penerapan SAKTI juga tidak dapat dilepaskan dari konteks organisasi tempat sistem tersebut dijalankan. Keberadaan sistem keuangan digital yang terintegrasi memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pegawai dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, sehingga proses kerja menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam praktik administrasi sehari-hari. Dengan demikian, efektivitas implementasi SAKTI bersifat kontekstual, di mana keberhasilan sistem dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain teknologi dan praktik organisasi, sehingga sistem informasi keuangan publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika kelembagaan yang melingkupinya.

Dalam kerangka efektivitas multidimensional (Ogedengbe et al., 2024), penilaian terhadap sistem informasi publik mencakup dimensi finansial dan sistemik yang saling melengkapi. Dimensi finansial tercermin pada efisiensi pengelolaan sumber daya dan peningkatan akurasi pelaporan keuangan, sedangkan dimensi sistemik terlihat pada keterpaduan modul, konsistensi alur kerja, serta keberlanjutan sistem dalam mendukung proses administrasi secara menyeluruh. Dalam penerapan SAKTI, keberadaan audit trail, verifikasi berjenjang, serta pencatatan yang terdokumentasi secara sistematis memperkuat fungsi sistem sebagai mekanisme pengendalian administratif yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, efektivitas SAKTI tidak hanya tercermin dari percepatan proses kerja, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keteraturan, konsistensi data, dan stabilitas sistem dalam mendukung tata kelola keuangan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian (Khairudin, 2024) dan (Zaenudin et al., 2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAKTI dipengaruhi oleh desain sistem yang terintegrasi, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan organisasi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi keuangan publik terbentuk melalui interaksi antara desain sistem, kapasitas pengguna, dan stabilitas infrastruktur. Dalam konteks Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, interaksi tersebut tercermin pada penguatan tata kelola keuangan yang lebih transparan, terstruktur, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik.

3.2 Pemaknaan Pegawai terhadap Digitalisasi melalui SAKTI

Tabel 3. Pemaknaan Pegawai terhadap Digitalisasi melalui SAKTI

Aspek Pemaknaan	Bentuk Pemaknaan	Implikasi terhadap Proses Kerja
Konseptual	Digitalisasi sebagai perubahan sistem kerja	Proses kerja menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi
Operasional	Sistem terintegrasi menggantikan aplikasi terpisah	Alur kerja lebih sederhana dan konsisten
Individual	Aktivitas tercatat melalui akun pengguna	Mendorong kehati-hatian dan tanggung jawab personal
Organisasional	Digitalisasi sebagai bagian reformasi birokrasi	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3, pemaknaan pegawai terhadap digitalisasi melalui SAKTI dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pemaknaan pegawai terhadap digitalisasi melalui SAKTI menunjukkan bahwa digitalisasi dipahami sebagai transformasi sistem kerja, bukan sekadar perubahan alat kerja dari manual ke elektronik. Pegawai memandang SAKTI sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi keuangan dalam satu alur kerja yang terkoordinasi, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan mengurangi fragmentasi proses. Digitalisasi



dipersepsikan sebagai upaya penyederhanaan prosedur kerja yang sebelumnya tersebar pada beberapa aplikasi terpisah. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan:

“Sebelumnya kami menggunakan aplikasi desktop yang terpisah-pisah. Dengan SAKTI, seluruh pengelolaan data keuangan menjadi lebih mudah karena semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi.” (I5)

Selain memberikan kemudahan, digitalisasi juga dimaknai sebagai peningkatan tanggung jawab personal dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari pernyataan informan berikut:

“Setiap pengguna memiliki akun dan tanggung jawab masing-masing. Di dalam sistem juga tercatat siapa yang melakukan input, siapa yang memvalidasi, dan siapa yang menyetujui.” (I5)

Setiap aktivitas pengguna tercatat melalui akun dan hak akses masing-masing, sehingga mendorong kehati-hatian dalam melakukan pencatatan dan verifikasi transaksi. Kondisi ini membentuk kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki implikasi administratif dan akuntabilitas yang jelas. Pemaknaan tersebut mencerminkan proses adaptasi dan internalisasi nilai-nilai akuntabilitas yang terintegrasi dalam sistem, sehingga teknologi tidak lagi diposisikan sebagai alat administratif semata, melainkan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

Dalam perspektif teori stewardship (Rouault & Albertini, 2021), pemaknaan digitalisasi ini mencerminkan peran pegawai sebagai pengelola yang bertindak untuk kepentingan organisasi. Pegawai tidak hanya menjalankan sistem karena tuntutan prosedural, tetapi juga memahami sistem sebagai sarana untuk menjaga kualitas dan integritas laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahman et al., 2023) yang menunjukkan bahwa implementasi SAKTI mendorong peningkatan kesadaran tanggung jawab individu dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, (Nasrulloh & Nabire, 2025) menemukan bahwa penerapan SAKTI berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penguatan pengendalian internal dan kepatuhan prosedural. Pada level organisasional, pemaknaan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi melalui SAKTI dipahami sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang menekankan kepatuhan prosedural dan penguatan tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, penerapan SAKTI berkontribusi pada pembentukan perilaku kerja yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan organisasi.

3.3 Kendala Implementasi SAKTI

Tabel 4. Kendala dalam Implementasi Aplikasi SAKTI

Jenis Kendala	Bentuk Kendala	Dampak terhadap Proses Kerja
Teknis	Gangguan jaringan internet	Akses sistem terhambat pada waktu tertentu
Teknis	Perlambatan sistem pada periode pelaporan	Proses input dan persetujuan menjadi tertunda
Sistem	Pemeliharaan sistem terpusat	Penggunaan sistem tidak dapat dilakukan sementara
Adaptif	Penyesuaian awal terhadap sistem baru	Membutuhkan waktu adaptasi pengguna

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, kendala dalam implementasi aplikasi SAKTI sebagian besar berasal dari aspek teknis yang memengaruhi stabilitas dan kelancaran proses pelaporan keuangan. Meskipun penerapan SAKTI dinilai efektif, implementasinya tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama yang bersifat teknis. Gangguan jaringan internet, perlambatan sistem pada periode pelaporan, serta pemeliharaan sistem dari pusat merupakan kendala yang paling sering dirasakan oleh pengguna. Kendala tersebut umumnya muncul pada saat beban sistem meningkat, seperti pada akhir bulan atau akhir tahun anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala implementasi SAKTI tidak bersifat struktural, melainkan lebih pada aspek teknis yang berkaitan dengan kapasitas sistem dan infrastruktur pendukung. Hal ini mengindikasikan bahwa secara organisasi, kesiapan pengguna relatif telah terbentuk, sehingga hambatan yang muncul tidak mengganggu keberlangsungan proses pengelolaan keuangan secara signifikan. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Kendala teknis yang paling sering terjadi biasanya berkaitan dengan jaringan internet atau saat sistem sedang dalam masa pemeliharaan dari pusat.” (I8)

Namun demikian, kendala teknis tersebut bersifat temporer dan tidak berkembang menjadi hambatan struktural dalam penyusunan laporan keuangan. Pegawai telah memiliki pemahaman yang memadai terhadap alur kerja sistem, sehingga mampu menyesuaikan diri ketika kendala teknis terjadi. Tidak ditemukannya kendala non-teknis yang dominan menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia relatif siap dalam mengoperasikan sistem dan menerima perubahan pola kerja yang ditimbulkan oleh digitalisasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi SAKTI lebih berkaitan dengan aspek infrastruktur dan kapasitas sistem dibandingkan dengan resistensi pengguna. Dalam perspektif teori tata kelola (good governance) yang dikemukakan oleh (Rahmawati & Tjenreng, 2025), efektivitas pengelolaan publik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kualitas proses kelembagaan, termasuk dukungan infrastruktur dan kapasitas institusional dalam menjalankan sistem secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterbatasan jaringan, stabilitas server, maupun dukungan teknis menjadi bagian dari dimensi responsibilitas organisasi dalam memastikan sistem berjalan optimal.



Temuan ini juga selaras dengan kerangka efektivitas multidimensional (Ogedengbe et al., 2024), khususnya pada dimensi sistemik yang menekankan pentingnya keandalan dan keberlanjutan sistem dalam mendukung proses administrasi. Penelitian (Khairudin, 2024) dan (Zaenudin et al., 2024) menunjukkan bahwa hambatan implementasi SAKTI di berbagai instansi pemerintah lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas sistem dibandingkan dengan penolakan pengguna. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan sistem informasi keuangan publik sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur dan dukungan teknis yang memadai. Dengan demikian, peningkatan kualitas infrastruktur serta penguatan dukungan teknis menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan efektivitas sistem keuangan digital di lingkungan instansi pemerintah.

3.4 Peran SAKTI dalam Transparansi dan Akuntabilitas

Tabel 5. Peran SAKTI dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Aspek Tata Kelola	Mekanisme dalam Sistem	Implikasi Tata Kelola
Transparansi	Hak akses dan tampilan data terkontrol	Informasi keuangan dapat dipantau sesuai kewenangan
Akuntabilitas	Verifikasi berjenjang	Setiap transaksi melalui proses persetujuan
Pengendalian	Audit trail aktivitas pengguna	Transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan
Kepatuhan	Standarisasi prosedur sistem	Mengurangi penyimpangan administrasi

Sebagaimana disajikan pada Tabel 5, penerapan SAKTI menunjukkan peran yang signifikan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Mekanisme hak akses pengguna, verifikasi berjenjang, serta pencatatan aktivitas melalui audit trail memungkinkan setiap transaksi keuangan dipantau dan ditelusuri sesuai kewenangan. Kondisi ini menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih kuat dibandingkan dengan mekanisme manual atau sistem yang terpisah. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SAKTI tidak hanya memperkuat aspek administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen tata kelola yang mendorong peningkatan kualitas pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan secara sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem keuangan mampu memperkuat implementasi prinsip good governance secara operasional di tingkat instansi. Sebagaimana dijelaskan oleh informan:

“Setiap pengguna punya login user masing-masing. Semua aktivitas terekam, jadi sistemnya sudah akuntabel dan transparan.” (I3)

Dalam perspektif teori tata kelola yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan administrasi publik (Rahmawati & Tjenreng, 2025). Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai ketersediaan mekanisme yang memungkinkan proses kerja dapat ditelusuri secara jelas. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pada kejelasan tanggung jawab dan kemampuan setiap aktor untuk mempertanggungjawabkan tindakan administratifnya. Penerapan SAKTI mendukung kedua prinsip tersebut melalui sistem pencatatan terintegrasi yang terdokumentasi secara sistematis.

Sejalan dengan temuan (Khairudin, 2024) dan (Zaenudin et al., 2024), implementasi SAKTI berkontribusi terhadap penguatan kesiapan sumber daya manusia serta dukungan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh desain teknis, tetapi juga oleh kapasitas institusional dalam mengelola perubahan. Dalam konteks instansi teknis seperti BPN, kompleksitas karakteristik anggaran dan tuntutan pelayanan publik memberikan dinamika tersendiri dalam proses adaptasi sistem. Berbeda dengan penelitian pada instansi pusat yang relatif memiliki dukungan infrastruktur lebih stabil, temuan di Kanwil BPN menunjukkan bahwa kendala jaringan dan keterbatasan literasi digital masih menjadi tantangan pada tahap awal implementasi, meskipun secara umum sistem telah mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, efektivitas penerapan SAKTI terbentuk melalui interaksi antara aspek teknologi, kompetensi pengguna, dan dukungan organisasi. Sistem keuangan digital yang terintegrasi mampu mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas apabila diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia serta mekanisme pengendalian yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kapasitas institusional dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik administrasi sehari-hari. Dengan demikian, penerapan SAKTI di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu memberikan gambaran bahwa digitalisasi keuangan negara dapat berjalan efektif pada instansi teknis non-keuangan yang memiliki kompleksitas operasional tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan melalui penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi SAKTI pada satuan kerja yang diteliti menunjukkan tingkat efektivitas yang baik dalam mendukung proses pengelolaan keuangan secara digital. Efektivitas tersebut tercermin dari meningkatnya efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, karena sistem



yang terintegrasi memungkinkan proses penginputan data, verifikasi, hingga penyusunan laporan dilakukan secara lebih cepat dan terstandar dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang masih menggunakan beberapa aplikasi terpisah. Selain itu, penggunaan aplikasi SAKTI juga mampu meningkatkan akurasi pencatatan keuangan melalui fitur validasi otomatis yang dapat meminimalkan kesalahan input data serta mempermudah proses koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian. Dari sisi tata kelola organisasi, penerapan SAKTI mendorong transparansi dan akuntabilitas karena setiap transaksi keuangan tercatat secara sistematis melalui akun pengguna masing-masing serta melalui mekanisme verifikasi berjenjang sebelum memperoleh persetujuan akhir. Kondisi tersebut secara tidak langsung meningkatkan tanggung jawab dan kehati-hatian pegawai dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, digitalisasi melalui aplikasi SAKTI tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sarana reformasi administrasi yang mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan, terkontrol, dan akuntabel. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKTI dapat menjadi strategi yang efektif bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal efisiensi proses kerja, pengendalian internal, serta peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan. Adapun keterbaruan penelitian ini terletak pada penggambaran pemaknaan pegawai terhadap digitalisasi sistem keuangan melalui SAKTI yang dilihat dari aspek konseptual, operasional, individual, dan organisasional, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi sistem terhadap proses kerja. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada lingkup satuan kerja tertentu dengan jumlah informan yang terbatas serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas pada seluruh instansi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menambah jumlah responden, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas implementasi aplikasi SAKTI dalam digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah.

REFERENCES

- Azkar, M., Widodo, S., & Aminudin, A. (2023). Readiness to Use WEB-Based Integrated Applications Through the Agency Level Financial Application System (SAKTI) for the Function of State Financial Management (Case Study on the APBN Work Unit in the Regional Office of the Ministry of Religion of Beng. *International Journal of Policy and Public Administration*, 4, 97–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.31186/IJPPA>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke ' s approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Dwihaika, F. T., & Rukmini. (2024). Efektivitas Aplikasi SAKTI Dalam Digitalisasi Pelaporan Bendahara Pengeluaran di KPPN Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(02), 1–8.
- Efremoval, T. A. (2024). Digital Technologies are a New Vector for the Development of Public Finance. *Theory and Practice of Social Development*, 2, 72–78. <https://doi.org/10.24158/tipor.2024.2.9>
- Fathiya, D. N., & Viani, A. M. (2025). Public Sector Accounting Transformation in Indonesia : Measuring Cloud Accounting-Based Digitalization Readiness. *Accounting and Financial Analysis Journal*, 1(2), 57–62.
- Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. *Owner*, 8(1), 300–313. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846>
- Indonesia, D. J. P. K. K. R. (2022). Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3842-peluncuran-sakti-tandai-integrasi-sistem-pengelolaan-keuangan-pemerintah.html>
- Indonesia, D. J. P. K. K. R. (2023). Jurnal SAKTI Transaksi Uang Persediaan. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/jurnal-sakti-transaksi-uang-persediaan-19d55963/detail/>
- Kadir, A., Sanni, M., & Oni, O. O. (2025). The Effect of Digitalized Accounting Practices on the Financial Accountability of Ministries, Departments, and Agencies (MDAs) in Nigeria. *ANUK College of Private Sector Accounting Journal*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.65922/tnxeb931>
- Khairudin, H. (2024). Implementation of the SAKTI Application Budgeting Module at KPPN Bandar Lampung Working Partner Satker. *International Journal of Research and Review*, 11, 497–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.52403/ijrr.20240252>
- Nasrulloh, A., & Nabire, A. (2025). Effect of SAKTI Implementation and IKPA on Financial Report Quality with Internal Control as an Intervening Variable. *GOODWILL Journal of Economics, Management, and Accounting*, 5(1), 9–16. https://doi.org/https://doi.org/10.65246/p_0f23p71
- Nasution, I. J., Br Purbana, R., & Maisyarah, R. (2024). Efektifitas Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Kota Binjai. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 2(4), 454–468. <https://doi.org/10.55047/jekombital.v2i4.663>
- Ogedengbe, A. O., Jejenywa, T. O., Friday, S. C., Olatunji, H., & Ameyaw, M. N. (2024). Framework for Digitally Transforming Financial Management Systems in SME and Public Sector Organizations. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 5(5), 1122–1142.
- Perdana, F. I. P., Hardiyanti, A. T., & Lestari, R. M. E. (2023). Analysis of the Implementation of the Accounting Application System for Line Ministry (SAKTI) in Government Financial Reporting at the Directorate General of State Asset Management , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. *Journal of Social Transformation and Regional Development*, 2(270), 68–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/jstard.2023.05.02.008>
- Pratama, M. A., Faisol, A., & Rachmad, M. (2025). The Effect of Accounting Information System Implementation and Human Resource Competence on the Financial Reporting Quality of Public Service Agencies in the Indonesian Navy. *Journal of*



- Industrial Engineering & Management Research, 6(3), 136–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.7777/jiemar.v7i2>
- Putri, N. W., & Harahap, S. N. (2024). Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pelaporan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Owner*, 8(3), 2917–2927. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2119>
- Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT. *Asersi: Jurnal Akuntansi Erapan Dan Bisnis*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3901>
- Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoretis. *PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323. <https://doi.org/10.37481>
- Rouault, J., & Albertini, E. (2021). Reconciling the social sector with external accountability requirements : lessons from stewardship theory Reconciling the social sector with external accountability requirements : lessons from stewardship theory. *Elsevier*, 142, 0–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.082>
- Said, W., & Yendrawati, R. (2023). Analisis Sistem Penggunaan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Penganggaran Balai Besar Pendidikan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i4.451>
- Simamora, F. A., & Wahyudi, I. (2022). Implementasi “SAKTI” dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Penilaian Kinerja Berbasis Laporan Keuangan – Studi Kasus Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. *SEMINAR NASIONAL PERBANAS INSTITUTE 2023 “Environmental, Social, Governance (ESG) Investment and Social Responsibility.”*
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.
- Wiratmoko, A. O. T., Roekhudin, & Mardiaty, E. (2024). The Effect of IFMIS Symbolic Adoption on Post-Acceptance Use Behavior: Moderated Analysis. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 697–704. <https://doi.org/10.37034/infv6i4.934>
- Zaenudin, Negoro, A., & Suprpta, I. (2024). Implementasi aplikasi sakti kementerian keuangan pada kinerja kpu. *Balance Vocation Accounting Journal*, 8 (1)(60), 101–116. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/bvaj.v8i2.12908>
- Zhuk, I., Khaletskaya, A., Stepura, T., Shchepanskiy, E., Sadova, U., & Pyla, V. (2022). Public Administration System in the Field of Finance Under the Influence of Digitalization. *Aessra: Economic Affairs*, 67(03), 225–231. <https://doi.org/10.46852/0424-2513.3.2022.11>